

PEREMPUAN DAN PERBANKAN: SEBUAH TINJAUAN TENTANG PERAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PENGUSAHA UMKM PEREMPUAN DI INDONESIA

Deasy Lestary Kusnandar¹

Email:Deasylestary@unsil.ac.id

¹Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi

Abstrak

Inklusi keuangan merupakan salah satu cara untuk memasyarakatkan sektor keuangan khususnya mempermudah layanan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat. Peningkatan taraf hidup adalah salah satu hasil yang diharapkan jika inklusi keuangan berjalan baik dan menyeluruh. Program inklusi keuangan di Indonesia diharapkan memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, di antaranya: masyarakat berpenghasilan rendah, pinggiran, minoritas, atau tidak mempunyai legal identitas, serta kaum perempuan dan kaum muda. Fokus tulisan adalah bagaimana inklusi keuangan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap para pengusaha UMKM perempuan di Indonesia, serta bagaimana program inklusi keuangan dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Penelitian menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Analisis perbandingan dilakukan berdasarkan data sekunder dari berbagai sumber. Penelitian menyimpulkan agar inklusi keuangan dapat dijalankan secara menyeluruh di Indonesia dan dapat berdampak secara signifikan terhadap pengusaha UMKM, khususnya bagi para pengusaha perempuan.

Kata kunci: inklusi keuangan, akses perbankan, layanan perbankan, pengusaha UMKM perempuan, Perekonomian Indonesia

1. Pendahuluan

Inklusi keuangan atau *Financial Inclusion* merupakan sebuah gagasan yang mulai diperkenalkan secara global sejak awal tahun 2000. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tujuannya membantu kesejahteraan dunia menuangkan beberapa kerangka pemikiran besar dalam *Millennium Development Goals* (MDG). Inklusi keuangan merupakan sebuah program global yang digerakkan masing masing negara untuk memberikan kesempatan dan akses finansial kepada masyarakat yang lebih luas. Sekjen PBB saat itu (Kofi Annan) pada 2006 dalam Ocampo (2006) menyatakan:^[7]

“Building inclusive financial sectors improves people’s lives, in particular those of the poor. A small loan, a savings account or an insurance policy can make a great difference to a low-income family. They enable people to invest in better nutrition, housing, health and education for their children. They ease the strain of coping with difficult times caused by crop failures, illness or death. They help people plan for the future. In many developing countries, small-scale enterprises and

micro-entrepreneurs face severe financing constraints. But with access to finance, they can participate fully in the economic life of their societies, create employment for themselves and others and realize their full potential. Where such businesses are given opportunities to develop, countries will have a better chance to flourish. Inclusive financial sectors can go a long way toward breaking the vicious circle of poverty. But an unremitting effort by the international community will be needed. Let us all do our utmost to empower the poor and to ensure that poor people around the world have access to a wider range of financial services. With more opportunities to build on their ideas, energies and visions, they will lead the way in working their way out of poverty with dignity.”

Pada Desember 2009, beberapa tujuan Inklusi keuangan tercantum dalam pernyataan PBB, di antaranya: (i) akses ke layanan perbankan umum seperti kredit, sewa, hipotek, asuransi, pensiun, dan uang transfer; (ii) peraturan internal dan peraturan eksternal dari lembaga keuangan yang akan mendorong inklusi keuangan

melalui kebijakan; (iii) investasi berkelanjutan di lembaga keuangan dalam rangka untuk memungkinkan akses jasa keuangan di depan; dan (iv) mendorong persaingan di area perbankan, sehingga bank dapat bertahan secara ekonomi dan memberikan layanan produk dan jasa yang ditujukan untuk mendorong inklusi keuangan—terutama bagi masyarakat yang belum mengenal jasa perbankan dan juga sistem perbankan tradisional.

Tema utama dari *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah pengurangan kemiskinan dalam segala bentuknya. MDGs menekankan indikator pembangunan sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak, untuk memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Peran negara dalam pencapaian tujuan MDG dapat melalui langkah fiskal untuk meningkatkan investasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Sementara sistem keuangan dapat memainkan peran dalam memperkuat pencapaian tujuan MDG yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam aktivitas menabung, meningkatkan taraf hidup, dan pembangunan infrastruktur ekonomi serta menyediakan sistem pembayaran yang efisien. Dengan adanya inklusi keuangan berarti penyediaan jasa keuangan terjangkau, yakni akses ke pembayaran dan pengiriman fasilitas, tabungan, pinjaman dan asuransi serta layanan oleh sistem keuangan formal bagi mereka yang cenderung untuk dikecualikan menjadi lebih mudah untuk dijangkau.^[10]

Inklusi keuangan yang mempromosikan akses dan penggunaan layanan keuangan berkualitas tinggi secara global, khususnya di antara orang-orang miskin, sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif. Dalam hal ini, perempuan di berbagai belahan dunia menghadapi hambatan akses keuangan.

Hal seperti ini mencegah mereka untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan meningkatkan taraf kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, Bank Dunia berupaya mempromosikan inklusi keuangan bagi perempuan untuk membantu mencapai tujuan MDG, yaitu

mengurangi kemiskinan dan persamaan gender. Laporan Bank Dunia 2012 menunjukkan bahwa kesetaraan gender penting dalam proses inklusi keuangan. Dampak pemberdayaan perempuan dalam ekonomi sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi karena hal ini merupakan cara yang cerdas secara ekonomi. Jika perempuan dapat diberdayakan secara ekonomi, ini akan membantu pengentasan kemiskinan.^[1]

Laporan Bank Dunia dalam *World's Development Report* menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persamaan gender, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Peran perempuan di berbagai belahan dunia pun mengalami banyak perubahan. Perempuan merupakan penghuni 50% dari populasi dunia, tetapi hanya 40.8% yang menjadi pekerja di sektor formal. Sisanya lebih banyak bekerja di sektor informal. Tingkat pendidikan perempuan yang makin meningkat menjadikan taraf hidup perempuan lebih baik karena pekerjaan yang digelutinya. Selain itu konsumsi perempuan juga meningkat dari 20 *trillion* USD pada 2009 yang diperkirakan menjadi 28 *trillion* USD pada 2014. Sementara itu, perusahaan yang dimiliki oleh perempuan pun meningkat namun di lain pihak para pengusaha perempuan banyak yang mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit dari perbankan ataupun layanan perbankan lainnya. Padahal akses layanan perbankan dan fasilitas perbankan merupakan salah satu cara untuk memperkuat ekonomi masyarakat.^[2]

Secara umum kebijakan yang paling efisien untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Percepatan pertumbuhan ekonomi berperan sebagai syarat dasar yang paling strategis bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat. Elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan dengan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat dan pelaku usaha seperti UMKM. Artinya, harus ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sektor keuangan

dalam perekonomian masyarakat. Inilah esensi utama dari inklusi keuangan (*financial inclusion*). Inklusi keuangan adalah kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun nonharga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Yang dimaksud hambatan harga adalah prasyarat seperti mesti menyetor dana dengan besaran tertentu ketika membuka rekening di bank, misalnya. Padahal tidak semua lapisan masyarakat bisa memenuhi syarat minimal itu. Sedangkan hambatan nonharga biasanya berupa persyaratan administratif seanebak yang terkadang dianggap memberatkan konsumen.^[3]

Akses terhadap pelayanan perbankan menjadi bagian yang penting pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sistem inklusi keuangan yang baik dapat membantu kaum miskin untuk memperbaiki taraf hidupnya, sehingga mereka pun dapat menikmati pelayanan perbankan sebagai fasilitas yang mendukung kehidupan mereka sehari-hari. Pelayanan perbankan yang mudah diakses akan mempermudah banyak orang untuk dapat melakukan aktifitas perbankan seperti meminjam kredit ataupun menabung, sehingga mereka dapat membangun asset dan juga membantu kegiatan usaha ataupun perdagangan yang ada di masyarakat. Inklusi Keuangan yang berjalan baik akan sangat berpengaruh pada beberapa kelompok masyarakat yang terkadang kurang diuntungkan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pinggiran, minoritas, atau tidak mempunyai legal identitas, kaum perempuan, dan kaum muda. Untuk alasan tersebut diatas maka tujuan program inklusi keuangan dijalankan, yang pada akhirnya diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.^[5]

Data Laporan World Bank pada tahun 2010 tentang kondisi Indonesia yang terkait dengan inklusi keuangan dapat digambarkan sebagai berikut ini. Dari 234,42 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 50% yang memiliki akses atas layanan lembaga keuangan formal. Dari

jumlah itu, sekitar 35 juta orang hanya terlayani lembaga keuangan non-formal seperti koperasi simpan-pinjam. Meskipun demikian, ada sekitar 40 juta orang yang sama sekali tidak tersentuh layanan jasa keuangan dalam bentuk apapun. Itulah gambaran memprihatinkan dari hasil survei Bank Dunia pada tahun 2010. Terdapat empat layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat, yakni penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk dana pensiun. Keempat aspek dalam lingkup pengelolaan sistem keuangan ini menjadi prasyarat mendasar untuk menggapai kehidupan masyarakat yang lebih baik (World Bank Survey, 2010).

Sementara itu di Indonesia sendiri, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil pada 2013 terdapat 57.895.721 Usaha Menengah Kecil (UMK) yang 60% dari totalnya melibatkan pekerja perempuan. Terdapat kenaikan sebesar 2,41% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. UMK merupakan salah satu faktor yang membantu ketahanan ekonomi karena UMK menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, akses layanan perbankan bagi pengusaha UMK belum dipermudah. Hal ini perlu diperhatikan dengan melakukan inklusi keuangan, agar para usahawan perempuan dalam skala UMK dapat juga menikmati layanan perbankan. Layanan perbankan yang dapat membantu para pengusaha UMK antara lain: pemberian kredit untuk modal kerja dan juga layanan perbankan lainnya.^[8]

Pengusaha perempuan di Indonesia perlu mendapat dukungan modal dari perbankan untuk dapat membesarkan usaha dan membantu kelancaran usahanya. Kemampuan wirausaha perempuan tidak kalah dari laki-laki. Menurut *International Finance Corporation* (IFC), hal ini sebagai potensi bagi perbankan dan menjadikannya target pemasaran produk pembiayaan. Berdasarkan data IFC, perempuan memiliki potensi untuk menghasilkan hubungan perbankan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Hampir 90% pengusaha UMKM perempuan, modal

usahanya berasal dari modal mereka sendiri. IFC mendorong perbankan untuk mengembangkan produk khusus bagi perempuan wirausaha ini. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012). Di Indonesia sendiri, jumlah pengusaha perempuan lebih banyak berada dalam skala mikro dan kecil. ^[4] Data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 2015 tercatat, dari sekitar 52 juta pelaku UKM yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 60 persen usaha dijalankan oleh perempuan.

Perhatian kepada pengusaha perempuan Perhatian kepada pengusaha perempuan juga ditunjukkan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanannya bagi nasabah dari kaum hawa ini (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012). UMKM perempuan ini, paling bertahan dari krisis moneter, ekonomi, pangan, dan energi yang menimpa dunia dan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sehingga, banyak dukungan yang seharusnya diberikan kepada perempuan untuk menjadi pengusaha. Pemberian kredit kepada para pengusaha perempuan dan pemberian akses perbankan bagi para pengusaha UMKM perempuan. Perempuan merupakan pasar yang sangat potensial bagi bank komersial, mengingat masih banyak di antaranya yang belum terlayani oleh akses perbankan. Pihak perbankan dapat memperluas akses dan fasilitas bagi UMKM bagi para pengusaha perempuan dengan melakukan pemberian kredit untuk memperluas usaha.^[6]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi deskripsi kuantitatif. Penelitian melakukan analisis perbandingan berdasarkan data sekunder dari berbagai sumber, di antaranya: World Bank, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, dan beberapa sumber lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan salah satu negara dari tujuh negara di Asia yang memiliki program inklusi keuangan (*financial inclusion*) untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat secara

menyeluruh. Indonesia termasuk negara dengan tingkat *financial exclusion* cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional.

Beberapa data berikut ini dapat menjadi gambaran kondisi layanan perbankan dan akses keuangan di Indonesia dan seberapa perlu dan pentingnya program percepatan akses keuangan di Indonesia diberlakukan.

Tabel 1. Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia

No	. Uraian	Kriteria Asset	Kriteria Omzet
1	Usaha Mikro	Max. IDR 50 Juta	Max. IDR300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2.5 Milyar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Milyar	>2.5 Milyar – 50 Milyar

(Sumber: World Bank, Global Financial Inclusion Index 2011)

Data tersebut memberikan gambaran keterlibatan sektor keuangan di Indonesia. Survei itu juga menemukan bahwa kurang dari setengah penduduk memiliki akses terhadap jasa keuangan resmi dan sepertiga penduduk tidak memiliki tabungan dalam bentuk apapun dan dapat dianggap sebagai “tersisih secara keuangan”, terhalang terhadap akses terhadap kredit dalam bentuk apapun dari sektor keuangan yang resmi. Hal ini menekankan besarnya potensi yang ada di pasar dan sisi permintaan yang belum tersentuh.

Di lain pihak, jumlah pengusaha perempuan Indonesia baru mencapai 0,1 persen dari seluruh jumlah pengusaha yang ada di Indonesia. Padahal jumlah pengusaha secara total saja hanya mencapai 1,56 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. Pengusaha perempuan UMKM di Indonesia mencapai 60% dari total jumlah pengusaha UMKM. Jumlah pengusaha wanita yang tergabung dalam Iwapi mencapai 30 ribu anggota. Dengan 85% merupakan usaha kecil dan mikro, 13% usaha menengah, dan 2% golongan usaha skala besar.

Tabel 2. Kriteria usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM

	2013	2014	Perkembangan
Jumlah Pengusaha UMKM di Indonesia	56.534.592	57.895.725	2.41%
Jumlah Tenaga Kerja Terserap	101.722.458	107.657.109	5.83%

Tabel.3 Data UMKM di Indonesia

Responden yang mempunyai rekening di Bank	35 %
Penduduk dewasa Indonesia yang belum menabung	32 %
Penduduk dewasa Indonesia yang menabung di lembaga keuangan formal	48 %
Penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal	20 %

(Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014)

Tabel 4. Data Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia

Jumlah Pengusaha UMKM	60% dari total pengusaha UMKM
Pengusaha Perempuan di Indonesia	85% dari total pengusaha UMKM
Kategori Usaha	85% Usaha Mikro 13% Usaha Menengah 2% Usaha Besar

(Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014)

Dari hasil data, sejatinya dapat dilakukan berupa sosialisasi kegiatan atau forum yang bisa meningkatkan kesadaran keluarga terhadap kemampuan wirausaha perempuan, khususnya di daerah. Dengan demikian, perempuan diharapkan bisa lebih berdaya dan mandiri untuk membangun Indonesia.

Salah satu upaya perluasan akses keuangan melalui *branchless banking*, Bank Indonesia (BI) melakukan proyek percontohan untuk layanan perbankan tanpa kantor cabang (*branchless banking*), sebagai upaya perluasan akses keuangan

kepada masyarakat. Tabel 7 menunjukkan daftar bank yang siap untuk layanan *branchless banking*.

Tabel 5. Daftar Bank yang siap melakukan program *Branchless Banking* oleh Bank Indonesia

1.	BTPN
2.	Bank Sinar
3.	Bank Mandiri
4.	BRI
5.	CIMB Niaga

(Sumber: Bank Indonesia, 2013)

Bank sentral menetapkan proyek uji coba *branchless banking* ini selama enam bulan dalam periode Mei-November 2013. Baik bank atau perusahaan telekomunikasi bisa memilih delapan wilayah yang telah ditetapkan menjadi basis uji coba, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Pada 2008 Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Perum Pegadaian melakukan kesepakatan bersama untuk memberikan akses permodalan bagi perempuan pengusaha UMKM yang tercantum dalam keputusan menteri nomor: 01/MEN.PP/VII/2008. Kesepakatan ini mengeluarkan produk kredit KRISTA (Kredit Usaha Rumah Tangga) bagi para pengusaha UMKM perempuan. Kredit KRISTA adalah pembiayaan yang diberikan kepada perempuan pengusaha mikro dan kecil skala rumah tangga dalam upaya mendukung pemberdayaan keluarga sehat sejahtera. Tujuannya adalah memberikan kemudahan pelayanan terhadap akses permodalan bagi kelompok perempuan pengusaha mikro dan kecil; meningkatkan kemampuan perempuan pengusaha mikro dan kecil; menumbuhkan dan memupuk jiwa berwirausaha; meningkatkan dan mengembangkan usaha perempuan pengusaha mikro dan kecil untuk memperluas usahanya dengan memperoleh kredit. Sasaran program akses permodalan bagi perempuan pengusaha mikro dan kecil adalah: (a) kelompok usaha ekonomi produktif perempuan; dan (b) individu perempuan pengusaha mikro dan kecil.

KRISTA ditujukan kepada para pengusaha sangat mikro yang tergabung dalam suatu kelompok/asosiasi dengan jaminan pokok sistem tanggung renteng di antara anggota kelompok tersebut. KRISTA memberikan pinjaman tanpa agunan. Besar pinjaman pun sangat mikro, hanya Rp 1 juta dengan bunga 1% *flat* per bulan. Calon nasabah merupakan pengusaha sangat mikro, tergabung dalam suatu kelompok, usaha telah berjalan minimal 6 bulan, jumlah minimal anggota kelompok sebanyak 5 orang, dan nasabahnya harus ibu-ibu. Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 12 bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika usahanya berkembang, nilai pinjaman bisa dinaikkan hingga Rp 3 juta. Tabel berikut menunjukkan daftar lembaga perbankan yang memberikan perhatian kepada pengusaha UMKM perempuan, baik dengan memberikan kredit maupun pelatihan.

Tabel 6. Daftar Bank Pemberi Kredit pada Pengusaha UMKM Perempuan

No.	Nama Bank	Jenis Kredit/Pelatihan
1.	BTPN	Kredit Tunas Usaha Rakyat
2.	BJB	Kredit Guna Bakti
3.	Bank Mandiri	Pelatihan Wirausaha
4.	BII	BII Sukma
5.	BNI Syariah	Tunas Usaha Syariah
6.	BRI	Teras BRI

(Sumber: Bank Indonesia, 2013)

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan, maka dapat ditarik beberapa simpulan tentang program inklusi keuangan agar dapat dijalankan secara menyeluruh di Indonesia. Selain itu juga agar program inklusi keuangan dapat berdampak secara signifikan terhadap pengusaha UMKM khususnya para pengusaha perempuan. Pertama, karena hanya kurang dari setengah jumlah penduduk memiliki akses terhadap jasa keuangan resmi, semua hal yang disebutkan di atas dapat dicapai. Akan tetapi realisasinya membutuhkan upaya bersama yang melibatkan Pemerintah, Pengatur Sektor Keuangan/bank Indonesia, Sektor Perbankan, Sektor Keuangan dan para mitra pembangunan Indonesia. Kerja

sama yang terpadu dan terintegrasi akan menghasilkan kemajuan yang signifikan. Kedua, merancang suatu strategi keterlibatan sektor keuangan terpadu dengan strategi yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan memberikan arah yang jelas bagi penyusunan kebijakan dan sektor swasta. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas keterlibatan sektor keuangan. Sektor swasta juga dapat melihat bahwa terdapat pasar yang sangat besar dari penduduk Indonesia yang belum tersentuh oleh perbankan bila mereka dapat diraih lewat rancangan cara-cara yang inovatif. Ketiga, melakukan edukasi keuangan bagi para pengusaha UMKM perempuan dan juga memberi pembekalan tentang pengenalan layanan perbankan dan akses perbankan serta manfaat perbankan bagi para pengusaha perempuan. Keempat, memberi akses pelayanan perbankan yang lebih mudah bagi para pengusaha UMKM Perempuan seperti mempermudah pemberian kredit kepada para pengusaha UMKM Perempuan, pengenalan serta penggunaan *Branchless Banking* bagi para pengusaha UMKM perempuan. Juga dengan memperkenalkan jaringan telepon selular (ponsel) untuk memaksimalkan perbankan lewat ponsel (*mobile banking*) karena tingkat penetrasi ponsel lebih tinggi dari rekening bank serta tingkat penetrasi ponsel lebih tinggi dari rekening bank menjangkau penduduk yang tidak terlayani bahkan di daerah-daerah terpencil. Kelima, penggunaan teknologi baru bagi bank-bank umum dan lembaga keuangan non-bank dengan peraturan yang disederhanakan dapat memberi akses jasa keuangan agar lebih dekat kepada pengusaha UMKM perempuan yang belum tersentuh perbankan. Layanan perbankan lewat ponsel tidak hanya memangkas biaya tapi juga meningkatkan daya jangkau.

5. Daftar Pustaka

- [1] Anstey, C. (2012). Women in the Private Sector: Good for Development and Business. *Remarks by World Bank Managing Director at the 2012 Annual*

- Meetings Program of Seminars, Tokyo Japan.* Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/news/speech/2012/10/11/womens-participation-private-sector-good-development-and-business>
- [2] Bank Indonesia. (2013). *Data Kredit UMKM*. Diakses dari <http://www.bi.go.id/web/id/UMKM/BI/Kredit+Perbankan/Data+Kredit+UMKM/>
- [3] Johansyah, D. A. (2011). Inklusi Keuangan: Memperluas Akses Keuangan Untuk Bikin Rakyat Sejahtera. *Gerai Info-News Letter Bank Indonesia Edisi XV, Juni 2011, Tahun 2*. Diakses dari: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/9648CAB6-4807-48C5-8E0FB2C4FA05D206/26533/GIed15_juni2011_low.pdf
- [4] Kementerian Koperasi dan UKM. (2012, 21 Desember). *Melirik Potensi Perempuan Pengusaha*. Diakses dari http://www.dekop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1182:melirik-potensi-perempuan-pengusaha&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98
- [5] Klapper, Jandu, Sintim-Aboagye (2012). The Little Data Book on Financial Inclusion 2012. *Finance and Private Sector Development Team of The World Bank, Washington DC*. Diakses dari <http://data.worldbank.org/sites/default/files/the-little-data-book-on-financial-inclusion-2012.pdf>
- [6] Kementerian Pemberdayaan Perempuan. (2008). *Kesepakatan Bersama untuk Memberikan Akses Permodalan bagi Perempuan Pengusaha UMKM*. Diakses dari <http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian-negara-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak/1647-profile-/274-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak>
- [7] Ocampo, D. (2006) Building Inclusive Financial Sectors for Development, *United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) and the United Nations Capital Development Fund (UNCDF)*. Diakses dari http://www.uncdf.org/sites/default/files/Download/bluebook_0.pdf
- [8] Purnomo, H. (2011). *52 Juta UMK di Indonesia, 60% Dijalankan Perempuan*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2011/12/05/160638/1783039/5/52-juta-umk-di-indonesia-60-dijalankan-perempuan>
- [9] The World Bank. (2012). *Expanding Women's Access to Financial Services*. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/01/banking-on-women-extending-womens-access-to-financial-services>
- [10] Thorat, U. (2006). Financial Inclusion and Millennium Development Goals. *4th Program on Human Development and State Finances jointly organised by College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, UNDP and the Planning Commission, at CAB, Pune*. Diakses dari <http://www.bis.org/review/r060126f.pdf>